

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN
DI PROPINSI D.I. YOGYAKARTA
PERIODE TAHUN 2008 – 2014**

JURNAL SKRIPSI



DISUSUN OLEH :

Nama : Syahida Syita

Nomor Mahasiswa : 12313058

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2017

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN
DISTRIBUSI PENDAPATAN
DI PROPINSI D.I. YOGYAKARTA
PERIODE TAHUN 2008 – 2014**

Syahida Syita

Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dan mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk yang bekerja, pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se Propinsi DIY periode tahun 2008-2014. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota se DIY. Alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis statistik. Sedangkan model penelitian menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda.

Hasil penelitian menunjukkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se Propinsi DIY periode tahun 2008-2014 termasuk kriteria yang rendah, dengan rata-rata indeks williamson sebesar 0,34229, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada pemerintahan daerah kota/kabupaten se Propinsi DIY, jumlah penduduk yang bekerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada pemerintahan daerah kota/kabupaten se Propinsi DIY, pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se Propinsi DIY dan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se Propinsi DIY

Kata kunci: pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk yang bekerja, pengeluaran pemerintah, investasi, tingkat ketimpangan distribusi pendapatan

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi merupakan suatu tekad masyarakat untuk berupaya mencapai kehidupan yang lebih baik dalam peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang pokok, peningkatan standar hidup secara ekonomis dan sosial. Menurut Sukirno (2010), pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Pembangunan daerah sebenarnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan yang dilaksanakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. Pertumbuhan ekonomi ini diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhannya. Pertumbuhan ekonomi yang cepat maka akan menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan, hal ini dikarenakan tidak memperhatikan apakah pertumbuhan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi (Lili, 2008).

Dampak dari terjadinya ketimpangan dapat berupa dampak positif ataupun dampak negatif. Dampak positif dari ketimpangan yaitu dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya sehingga akan tercapai kesejahteraannya. Dampak negatif dari ketimpangan antara lain inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi akan sering dipandang tidak adil (Todaro, 2004). Dampak negatif ketimpangan inilah yang akan menjadi masalah pembangunan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan tersebut yaitu menggunakan rasio gini yang memiliki nilai 0 sampai dengan 1. Nilai rasio gini semakin mendekati 1 menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan semakin tinggi. Untuk melihat nilai rasio gini di Indonesia berdasarkan provinsi pada kurun waktu 2008-2013, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Rasio Gini Propinsi Se Indoensia

| Propinsi | Rasio Gini | | | | | |
|---------------------------|------------|------|------|------|------|-------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Aceh | 0,27 | 0,29 | 0,30 | 0,33 | 0,32 | 0,341 |
| Sumatera Utara | 0,31 | 0,32 | 0,35 | 0,35 | 0,33 | 0,354 |
| Sumatera Barat | 0,29 | 0,30 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,363 |
| Riau | 0,31 | 0,33 | 0,33 | 0,36 | 0,40 | 0,374 |
| Jambi | 0,28 | 0,27 | 0,30 | 0,34 | 0,34 | 0,348 |
| Sumatera Selatan | 0,30 | 0,31 | 0,34 | 0,34 | 0,40 | 0,383 |
| Bengkulu | 0,33 | 0,30 | 0,37 | 0,36 | 0,35 | 0,386 |
| Lampung | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | 0,356 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 0,26 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,313 |
| Kepulauan Riau | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,32 | 0,35 | 0,362 |
| DKI Jakarta | 0,33 | 0,36 | 0,36 | 0,44 | 0,42 | 0,433 |
| Jawa Barat | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,41 | 0,41 | 0,411 |
| Jawa Tengah | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,38 | 0,38 | 0,387 |
| DI Yogyakarta | 0,36 | 0,38 | 0,41 | 0,40 | 0,43 | 0,439 |

| | | | | | | |
|---------------------|------|------|------|------|------|-------|
| Jawa Timur | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,37 | 0,36 | 0,364 |
| Banten | 0,34 | 0,37 | 0,42 | 0,40 | 0,39 | 0,399 |
| Bali | 0,30 | 0,31 | 0,37 | 0,41 | 0,43 | 0,403 |
| Nusa Tenggara Barat | 0,33 | 0,35 | 0,40 | 0,36 | 0,35 | 0,364 |
| Nusa Tenggara Timur | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,352 |
| Kalimantan Barat | 0,31 | 0,32 | 0,37 | 0,40 | 0,38 | 0,396 |
| Kalimantan Tengah | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,34 | 0,33 | 0,350 |
| Kalimantan Selatan | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,359 |
| Kalimantan Timur | 0,34 | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,36 | 0,371 |
| Sulawesi Utara | 0,28 | 0,31 | 0,37 | 0,39 | 0,43 | 0,422 |
| Sulawesi Tengah | 0,33 | 0,34 | 0,37 | 0,38 | 0,40 | 0,407 |
| Sulawesi Selatan | 0,36 | 0,39 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,429 |
| Sulawesi Tenggara | 0,33 | 0,36 | 0,42 | 0,41 | 0,40 | 0,426 |
| Gorontalo | 0,34 | 0,35 | 0,43 | 0,46 | 0,44 | 0,437 |
| Sulawesi Barat | 0,31 | 0,30 | 0,36 | 0,34 | 0,31 | 0,349 |
| Maluku | 0,31 | 0,31 | 0,33 | 0,41 | 0,38 | 0,370 |
| Maluku Utara | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,33 | 0,34 | 0,318 |
| Papua Barat | 0,31 | 0,35 | 0,38 | 0,40 | 0,43 | 0,431 |
| Papua | 0,40 | 0,38 | 0,41 | 0,42 | 0,44 | 0,442 |
| INDONESIA | 0,35 | 0,37 | 0,38 | 0,41 | 0,41 | 0,413 |

Sumber : www.bps.go.id (2016)

Dari Tabel 1 di atas, Yogyakarta memiliki nilai rasio gini 0,43 pada tahun 2012 dan 0,439 pada tahun 2013. Dengan data tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di Yogyakarta menempati urutan kedua tertinggi setelah Papua dengan rasio gini 0,44 pada tahun 2012 dan 0,442 pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa propinsi Yogyakarta memiliki ketimpangan distribusi pendapatan yang cukup tinggi.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan daerah. Dalam penelitian Putri dkk (2012) faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan daerah terdiri dari pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, investasi dan IPM. Dalam penelitian Dhyatmika dan Atmini (2013) faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan wilayah terdiri dari penanaman modal asing, pengeluaran pembangunan pemerintah dan tingkat pengangguran. Berbeda lagi dengan penelitian Sultan dan Sodik (2010) yang menggunakan faktor pertumbuhan penanaman modal asing, pertumbuhan ekspor dan pertumbuhan PDRB untuk memprediksi ketimpangan pendapatan regional. Sementara penelitian Adipuryanti dan Sudibia (2015) menggunakan variabel jumlah penduduk yang bekerja dan investasi untuk memprediksi ketimpangan distribusi pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi.

Berdasarkan berbagai penelitian yang telah dilakukan maka penelitian ini menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk yang bekerja, pengeluaran pemerintah dan investasi dalam hubungannya dengan tingkat ketimpangan pendapatan di propinsi DIY.

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk yang bekerja, pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se Propinsi DIY periode tahun 2008 – 2014?

Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengangguran dilakukan dan bersumber dari berbagai peneliti dan kajian pustaka antara lain :

Landasan Teori

Definisi Ketimpangan Pendapatan Regional

Ketimpangan pendapatan regional merupakan ketidakmerataan pendapatan yang terjadi pada masyarakat suatu wilayah dengan wilayah lain. Ketidakmerataan tersebut disebabkan adanya perbedaan faktor yang terdapat dalam wilayah tersebut. Faktor-faktor yang terkait antara lain kepemilikan sumber daya, fasilitas yang dimiliki, infrastruktur, keadaan geografis wilayah dan lain sebagainya.

Menurut Kuncoro (2004), terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk menganalisis development gap antar wilayah. Indikator tersebut adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Human Development Index (HDI), konsumsi rumah tangga perkapita, kontribusi sektoral terhadap PDRB, tingkat kemiskinan dan struktur fiskal. Faktor-faktor penyebab ketimpangan ekonomi daerah adalah konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, alokasi investasi, tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antar daerah, perbedaan sumber daya alam antar wilayah, perbedaan kondisi demograf antar wilayah dan kurang lancarnya perdagangan antar wilayah.

Adanya alokasi investasi yang tidak merata di seluruh wilayah. Karena investor lebih memilih wilayah yang memiliki fasilitas yang baik seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi, juga sumber daya manusia. Sedangkan, daerah yang tidak memiliki fasilitas yang belum baik akan semakin tertinggal, demikian akan menghasilkan ketimpangan antar wilayah yang semakin besar, sehingga akan berdampak pula pada terhadap tingkat pendapatan daerah.

Pertumbuhan Ekonomi

Suatu perekonomian dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah barang dan jasa meningkat. Jumlah barang dan jasa dalam perekonomian suatu negara dapat diartikan sebagai nilai dari Produk Domestik Bruto (PDB). Nilai PDB ini digunakan dalam mengukur persentase pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Perubahan nilai PDB akan menunjukkan perubahan jumlah kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan selama periode tertentu. Selain PDB, dalam suatu negara juga dikenal ukuran PNB (Produk Nasional Bruto) serta Pendapatan Nasional (*National Income*). Definisi PDB yaitu seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di suatu domestik atau agregat.

Salah satu kegunaan penting dari data-data pendapatan nasional adalah untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara dari tahun ke tahun. Dalam penghitungan pendapatan nasional berdasarkan pada harga-harga yang berlaku pada tahun tersebut. Apabila menggunakan harga berlaku, maka nilai pendapatan nasional menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Perubahan tersebut dikarenakan oleh pertambahan barang dan jasa dalam perekonomian serta adanya kenaikan-kenaikan harga yang berlaku dari waktu ke waktu. Pendapatan nasional berdasarkan harga tetap yakni penghitungan pendapatan nasional dengan menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu (tahun dasar) yang seterusnya digunakan untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun-tahun berikutnya. Nilai pendapatan nasional yang diperoleh secara harga tetap ini dinamakan pendapatan nasional riil.

Jumlah Penduduk yang Bekerja

Pertumbuhan penduduk dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Bertambahnya penduduk akan memperluas pasar dan perluasan pasar akan mempertinggi

tingkat spesialisasi dalam perekonomian. Dalam hal ini teori klasik Adam Smith juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu (necessary condition) bagi pertumbuhan ekonomi.

Tenaga kerja secara umum adalah penduduk yang siap bekerja. Penduduk yang bekerja adalah seseorang yang melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tidak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi.

Undang-undang No. 25 tahun 1997 menyebutkan definisi tenaga kerja yaitu setiap orang baik laki-laki maupun wanita yang sedang dalam dan atau melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara itu, angkatan kerja adalah penduduk usia kerja berumur 15 tahun atau lebih yang selama seminggu sebelum pencacahan bekerja atau punya pekerjaan yang sementara tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Berikutnya, bukan angkatan kerja adalah mereka yang selama seminggu yang lalu tidak bekerja hanya sekolah, mengurus rumah tangga, dan mereka yang tidak melakukan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai pekerja, sementara tidak bekerja atau mencari kerja.

Musfidar (2012) dalam penelitiannya di Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan bahwa jumlah penduduk yang berumur produktif baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja, akan meningkatkan angka ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini dikarenakan proporsi jumlah penduduk yang bekerja masih belum merata di sejumlah daerah, mereka masih banyak yang bekerja di pedesaan dibandingkan di perkotaan, sehingga terjadi perbedaan penghasilan antar mereka yang bekerja di kota dan mereka yang bekerja di desa. Mereka yang bekerja di perkotaan memiliki tingkat penghasilan yang tinggi jika dibandingkan dengan mereka yang bekerja di pedesaan.

Todaro (20004) mengatakan pengaruh antara ketimpangan distribusi pendapatan terhadap kemiskinan dipengaruhi oleh adanya peningkatan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk cenderung berdampak negatif terhadap penduduk miskin, terutama bagi mereka yang sangat miskin. Sebagian besar keluarga miskin memiliki jumlah anggota keluarga yang banyak sehingga kondisi perekonomian mereka yang berada di garis kemiskinan semakin memburuk seiring dengan memburuknya ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan.

Pengeluaran Pemerintah

Pembangunan ekonomi pada dasarnya adalah upaya untuk memperluas kemampuan dan kebebasan memilih. Terciptanya pembangunan ekonomi sangat tergantung dari peran pemerintah yang antara lain dimanifestasikan lewat pengeluaran pemerintah. Teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi pada prinsipnya dapat digolongkan menjadi tiga golongan (Mangkoesobroto, 2008), yaitu:

1. Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran daerah

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi sangat besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi.

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun peranan investasi swasta sudah semakin besar. Meskipun demikian,

peranan pemerintah tetap besar pada tahap ini karena peranan swasta yang semakin besar akan menimbulkan banyak kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa public dalam jumlah yang lebih banyak.

Selain itu pada tahap menengah, perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor ekonomi yang makin kompleks, sehingga pemerintah harus turun tangan untuk melindungi penduduk dari eksternalitas negatif suatu sektor dan melindungi buruh dalam meningkatkan kesejahteraannya. Musgrave juga berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, persentase investasi swasta terhadap PDB akan semakin besar dan sebaliknya persentase investasi pemerintah terhadap PDB akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi beralih dari penyediaan prasarana kepada pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan pelayanan kesehatan masyarakat.

2. Hukum Wagner

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan persentase pengeluaran pemerintah terhadap PDB yang semakin besar, yaitu dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Hukum Wagner dikenal dengan "The Law of Expanding State Expenditure". Dasar dari hukum tersebut adalah pengamatan empiris terhadap negara-negara maju. Dalam hal ini Wagner menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat. Kelemahan hukum Wagner adalah karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang public. Wagner hanya mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut teori organis mengenai pemerintah (organic theory of the state) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lain.

3. Teori Peacock and Wiseman

Peacock dan Wiseman adalah dua orang yang mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Teori mereka didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena

Pengeluaran Pemerintah Daerah

Pengeluaran pemerintah di Indonesia selain menjadi sumber pembiayaan bagi program-program sosial, juga berperan besar dalam meningkatkan dan mempertahankan permintaan agregat serta pertumbuhan ekonomi. Sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah tersebut berasal dari penerimaan dalam negeri dan hibah. Sedangkan pengeluaran pemerintah daerah dibiayai oleh pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dari

pemerintah pusat. Menurut fungsi pemerintahan, pengeluaran pemerintah daerah terdiri dari belanja untuk fungsi pelayanan umum, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi pendidikan dan belanja untuk fungsi perlindungan sosial. Sedangkan menurut jenis kegiatan berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 50, pengeluaran pemerintah daerah dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Belanja langsung

Belanja langsung adalah belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya dan kegiatan yang direncanakan. Jenis belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja barang modal. Keberadaan anggaran belanja langsung merupakan konsekuensi karena adanya program atau kegiatan. Karakteristik belanja langsung adalah bahwa input (alokasi belanja) yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan output yang dihasilkan. Variabelitas jumlah komponen belanja langsung sebagian besar dipengaruhi oleh target kinerja atau tingkat pencapaian program atau kegiatan yang diharapkan.

2. Belanja tidak langsung

Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Jenis belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Keberadaan belanja tidak langsung bukan merupakan konsekuensi dari ada atau tidaknya suatu program atau kegiatan. Belanja tidak langsung digunakan secara periodik dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah yang bersifat umum

Investasi

Investasi atau penanaman modal merupakan pengeluaran yang bertujuan untuk menambah modal serta memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang. Investasi yang terkonsentrasi hanya di beberapa daerah akan menjadi salah satu faktor penyebab adanya ketimpangan pendapatan. Hal ini dikarenakan, hanya daerah-daerah yang dinilai mendapatkan keuntungan yang menjanjikan yang akan dilirik oleh para investor baik investor dalam negeri maupun luar negeri.

Menurut Sukirno (2010) investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Dalam praktiknya, usaha untuk mencatat nilai penanaman modal yang dilakukan dalam suatu tahun tertentu, yang digolongkan sebagai investasi (atau pembentukan modal atau penanaman modal) meliputi pengeluaran berikut (Sukirno, 2010):

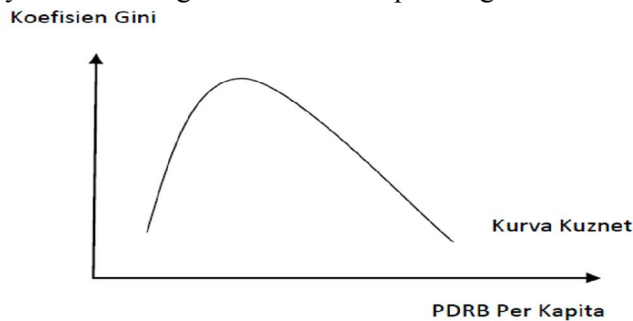
- 1) Pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan.
- 2) Pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik dan bangunan-bangunan lainnya.
- 3) Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, barang mentah dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional.

Ada dua peran investasi dalam makro ekonomi yakni yang pertama, karena merupakan komponen pengeluaran yang cukup besar dan tidak mudah habis, perubahan besar dalam investasi akan sangat mempengaruhi permintaan agregat dan

akhirnya berakibat juga pada output dan kesempatan kerja. Selain itu, investasi mendorong terjadinya akumulasi modal. Penambahan stok bangunan gedung dan peralatan penting lainnya akan meningkatkan output potensial suatu bangsa dan merangsang pertumbuhan ekonomi untuk jangka panjang. Dengan demikian, investasi memainkan dua peran yakni mempengaruhi output jangka pendek melalui dampaknya terhadap permintaan agregat dan mempengaruhi laju pertumbuhan output jangka panjang melalui dampak pembentukan modal terhadap output potensial dan penawaran agregat.

Hipotesis Kuznet

Simon Kuznets dalam Kuncoro (2006) membuat hipotesis adanya kurva U terbalik (*inverted U curve*) bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai maka distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu maka distribusi pendapatan akan merata. Menurut Kuznet pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas produksi dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan barang ekonomi kepada penduduknya. Simon Kuznet mengatakan bahwa tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, dan tahap selanjutnya distribusi pendapatannya akan membaik, namun pada suatu waktu akan terjadi peningkatan disparitas lagi dan akhirnya menurun lagi. Hal tersebut seperti digambarkan dalam kurva Kuznet



Gambar 2.1. Grafik Kuznet

METODE ANALISIS

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program Eviews 8. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jumlah pengangguran. Variabel independen yang digunakan adalah inflasi, upah minimum, pertumbuhan ekonomi. Metode analisis pada penelitian ini menggunakan metode model OLS (Ordinary Least Square) yang terdiri dari Uji asumsi klasik (Uji multikolinieritas, Uji Heterokedastisitas, Uji autokorelasi).

$$UN = \beta_0 + \beta_1 INF + \beta_2 UM + \beta_3 EG + \epsilon_t$$

Keterangan :

UN : Pengangguran di Provinsi Lampung

INF : Inflasi

UM : Upah Minimum Provinsi

EG : Pertumbuhan Ekonomi

Pemilihan Modal Regresi

Penelitian ini menggunakan uji MWD (uji Mackinnon, White, dan Davidson). Model ini bertujuan untuk memilih antara model regresi linear dengan model regresi log linier sehingga akan mendapatkan hasil regresi yang terbaik. Hasil dari uji MWD tersebut, yaitu

Tabel 4.1
Tabel Uji MWD

Dependent Variable: UN
Method: Least Squares
Date: 05/13/16 Time: 10:53
Sample: 2000 2015
Included observations: 16

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------|
| C | 410672.7 | 16823.37 | 24.41085 | 0.0000 |
| INF | -1115.446 | 527.1616 | -2.115947 | 0.0580 |
| UM | -0.100193 | 0.005518 | -18.15634 | 0.0000 |
| EG | -11999.23 | 2915.662 | -4.115438 | 0.0017 |
| Z1 | 261461.4 | 10891.74 | 24.00547 | 0.0000 |
| R-squared | 0.991245 | Mean dependent var | | 269176.0 |
| Adjusted R-squared | 0.988061 | S.D. dependent var | | 65557.87 |
| S.E. of regression | 7163.255 | Akaike info criterion | | 20.84162 |
| Sum squared resid | 5.64E+08 | Schwarz criterion | | 21.08306 |
| Log likelihood | -161.7330 | Hannan-Quinn criter. | | 20.85399 |
| F-statistic | 311.3443 | Durbin-Watson stat | | 0.946695 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | | |

Sumber : Olahan Data E-views 8.0.

Dependent Variable: LOG(UN)
 Method: Least Squares
 Date: 05/13/16 Time: 10:55
 Sample: 2000 2015
 Included observations: 16

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------|
| C | 16.61141 | 0.114591 | 144.9630 | 0.0000 |
| INF | -0.003985 | 0.001178 | -3.381327 | 0.0061 |
| LOG(UM) | -0.319005 | 0.009963 | -32.01922 | 0.0000 |
| EG | 0.021043 | 0.007827 | 2.688480 | 0.0211 |
| Z2 | -3.36E-06 | 8.18E-08 | -41.02196 | 0.0000 |
| R-squared | 0.996768 | Mean dependent var | | 12.47548 |
| Adjusted R-squared | 0.995592 | S.D. dependent var | | 0.242588 |
| S.E. of regression | 0.016106 | Akaike info criterion | | -5.169004 |
| Sum squared resid | 0.002853 | Schwarz criterion | | -4.927570 |
| Log likelihood | 46.35203 | Hannan-Quinn criter. | | -5.156640 |
| F-statistic | 848.0364 | Durbin-Watson stat | | 1.527677 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | | |

Sedangkan pada persamaan log linier diketahui bahwa nilai t hitung koefisien Z_2 adalah -41.02196 dan p-value sebesar 0.0000. sedangkan nilai t kritis pada α 5% dengan df (n-k) $16-4 = 12$ adalah 21.02. Karena t hitung $>$ t kritis pada α 5% maka Z_2 tidak signifikan maka menerima H_0 . Sehingga model yang tepat adalah model log linier.

Berdasarkan uji MWD tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model log linier baik untuk digunakan dalam penelitian ini.

$$\ln Y_t = \beta_0 + \beta_1 \ln X_{1t} + \beta_2 \ln X_{2t} + \beta_3 \ln X_{3t} + v_t$$

Tabel 4.2
Hasil Regresi Berganda

Dependent Variable: LOG(UN)
Method: Least Squares
Date: 05/13/16 Time: 10:46
Sample: 2000 2015
Included observations: 16

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------|
| C | 16.62039 | 1.361410 | 12.20822 | 0.0000 |
| INF | -0.003628 | 0.014000 | -0.259180 | 0.7999 |
| LOG(UM) | -0.326147 | 0.118348 | -2.755825 | 0.0174 |
| EG | 0.038735 | 0.092849 | 0.417178 | 0.6839 |
| R-squared | 0.502284 | Mean dependent var | | 12.47548 |
| Adjusted R-squared | 0.377855 | S.D. dependent var | | 0.242588 |
| S.E. of regression | 0.191344 | Akaike info criterion | | -0.257169 |
| Sum squared resid | 0.439351 | Schwarz criterion | | -0.064021 |
| Log likelihood | 6.057349 | Hannan-Quinn criter. | | -0.247278 |
| F-statistic | 4.036708 | Durbin-Watson stat | | 0.416567 |
| Prob(F-statistic) | 0.033711 | | | |

Sumber : Olahan Data E-views 8.0.

Hasil estimasi dari log linier menghasilkan R^2 sebesar 0.502284, artinya bahwa 50,22% variasi variable dependen (jumlah pengangguran di Provinsi Lampung) dapat dijelaskan oleh beberapa variable independen (tingkat inflasi Provinsi Lampung, upah minimum Provinsi Lampung dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung), sedangkan sisanya sebesar 49,78% dijelaskan oleh variable lain diluar model.

4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah hubungan linier antara variabel independen didalam regresi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dalam model dengan cara menguji koefisien korelasi (r) antar variabel independen. Sebagai aturan main yang kasar (*rule of thumb*), jika koefisien korelasi cukup tinggi diatas 0.85 maka diduga dalam model tersebut terdapat multikolinieritas, sebaliknya jika koefisien korelasi dibawah 0.85 maka diduga dalam model tersebut tidak terdapat multikolinieritas.

Tabel 4.3.
Uji Multikolinieritas

| | INF | UM | EG |
|-----|-----------|-----------|-----------|
| INF | 1.000000 | -0.421186 | -0.401160 |
| UM | -0.421186 | 1.000000 | 0.479186 |
| EG | -0.401160 | 0.479186 | 1.000000 |

Sumber : Olahan Data E-views 8.0

Pada table 4.3 dapat ditunjukkan bahwa berdasarkan hasil uji multikolinieritas dengan uji korelasi parsial antar variable independen, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi mengandung multikolinieritas.

4.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Salah satu asumsi penting dalam model OLS adalah varian dari residual yang konstan atau homoskedastisitas. Apabila residual mempunyai varian yang tidak konstan (heteroskedastisitas) maka estimator OLS tidak menghasilkan estimator yang BLUE (*best linier unbiased estimator*) tetapi hanya *Linier Unbiased Estimator*. Konsekuensinya apabila estimator tidak mempunyai varian yang minimum maka perhitungan standar error tidak bisa dipercaya kebenarannya dan interval estimasi maupun uji hipotesis yang didasarkan pada distribusi t maupun F tidak lagi bisa dipercaya untuk evaluasi hasil regresi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya masalah heteroskedastisitas maka peneliti menggunakan metode *Godfrey*.

Tabel 4.4
Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

| | | | |
|----------------------|-----------------|----------------------------|---------------|
| F-statistic | 1.444698 | Prob. F(3,12) | 0.2787 |
| Obs*R-squared | 4.245444 | Prob. Chi-Square(3) | 0.2362 |
| Scaled explained SS | 1.480508 | Prob. Chi-Square(3) | 0.6868 |

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 05/13/16 Time: 21:25

Sample: 2000 2015

Included observations: 16

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 0.357029 | 0.215316 | 1.658169 | 0.1232 |
| INF | 0.000265 | 0.002214 | 0.119657 | 0.9067 |
| LOG(UM) | -0.024129 | 0.018718 | -1.289138 | 0.2216 |
| EG | -0.002215 | 0.014685 | -0.150845 | 0.8826 |

| | | | |
|--------------------|----------|-----------------------|-----------|
| R-squared | 0.265340 | Mean dependent var | 0.027459 |
| Adjusted R-squared | 0.081675 | S.D. dependent var | 0.031579 |
| S.E. of regression | 0.030262 | Akaike info criterion | -3.945512 |
| Sum squared resid | 0.010990 | Schwarz criterion | -3.752365 |
| Log likelihood | 35.56410 | Hannan-Quinn criter. | -3.935621 |
| F-statistic | 1.444698 | Durbin-Watson stat | 1.189235 |
| Prob(F-statistic) | 0.278664 | | |

Sumber : Olahan Data E-views 8.0.

Pada tabel 4.4 p-value Obs*R-squared = 4.245444 sedangkan nilai kritis *chi-square* pada α 5% dengan df sebesar 12 adalah 21.02, karena nilai *chi-square* hitungannya lebih kecil dari nilai *chi-square* kritis maka dapat disimpulkan bahwa regresi tersebut tidak mengandung Heteroskedastisitas.

4.3.3 Uji Autokorelasi

Yang dimaksud autokorelasi adalah adanya korelasi antara anggota observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. Dalam kaitannya dengan asumsi metode OLS,

autokorelasi merupakan korelasi antara satu residual dengan residual yang lain. Dan salah satu asumsi penting metode OLS berkaitan dengan residual adalah tidak adanya hubungan residual satu dengan residual yang lain. Apabila didalam model ada autokorelasi maka estimator yang kita dapatkan akan mempunyai karakteristik linier, tidak bisa dan estimator metode kuadran terkecil tidak mempunyai varian yang minimum sehingga menyebabkan perhitungan standar error metode OLS tidak lagi bisa dipercaya. Selanjutnya interval estimasi maupun uji hipotesis yang didasarkan pada uji-t maupun uji-F tidak bisa dipercaya untuk evaluasi hasil regresi.

Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi (LM)

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

| | | | |
|---------------|----------|---------------------|--------|
| F-statistic | 7.254853 | Prob. F(2,10) | 0.0113 |
| Obs*R-squared | 9.471974 | Prob. Chi-Square(2) | 0.0088 |

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 05/13/16 Time: 21:26

Sample: 2000 2015

Included observations: 16

Presample missing value lagged residuals set to zero.

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------|
| C | -0.576585 | 0.966459 | -0.596596 | 0.5640 |
| INF | 0.004680 | 0.010325 | 0.453243 | 0.6600 |
| LOG(UM) | 0.050871 | 0.085565 | 0.594530 | 0.5654 |
| EG | -0.024850 | 0.070170 | -0.354136 | 0.7306 |
| RESID(-1) | 1.022673 | 0.294220 | 3.475883 | 0.0060 |
| RESID(-2) | -0.420713 | 0.313499 | -1.341989 | 0.2093 |
| R-squared | 0.591998 | Mean dependent var | -8.82E-16 | |
| Adjusted R-squared | 0.387998 | S.D. dependent var | 0.171143 | |
| S.E. of regression | 0.133886 | Akaike info criterion | -0.903653 | |
| Sum squared resid | 0.179256 | Schwarz criterion | -0.613932 | |
| Log likelihood | 13.22922 | Hannan-Quinn criter. | -0.888817 | |
| F-statistic | 2.901941 | Durbin-Watson stat | 1.670640 | |
| Prob(F-statistic) | 0.071311 | | | |

Sumber : Olahan Data E-views 8.0.

Berdasarkan dari hasil uji autokorelasi dengan menggunakan metode LM. Nilai square hitung (χ^2) sebesar 9.471974, sedangkan nilai kritis chi square (χ^2) pada α 5% dengan degree of freedom sebesar 10 adalah 18.31. Karena nilai chi-square hitung (χ^2) lebih kecil dari pada nilai kritis chi square (χ^2) maka dapat disimpulkan bahwa regresi tersebut tidak mengandung masalah autokorelasi. Lalu dilakukan penyembuhan autokorelasi dengan menggunakan metode HAC.

Tabel 4.6
Hasil Uji Autokorelasi (HAC)

Dependent Variable: LOG(UN)
 Method: Least Squares
 Date: 05/22/16 Time: 14:56
 Sample: 2000 2015
 Included observations: 16
 HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth = 3.0000)

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------|
| C | 16.62039 | 1.197201 | 13.88270 | 0.0000 |
| INF | -0.003628 | 0.008351 | -0.434497 | 0.6716 |
| LOG(UM) | -0.326147 | 0.072883 | -4.474918 | 0.0008 |
| EG | 0.038735 | 0.078360 | 0.494317 | 0.6300 |
| R-squared | 0.502284 | Mean dependent var | | 12.47548 |
| Adjusted R-squared | 0.377855 | S.D. dependent var | | 0.242588 |
| S.E. of regression | 0.191344 | Akaike info criterion | | -0.257169 |
| Sum squared resid | 0.439351 | Schwarz criterion | | -0.064021 |
| Log likelihood | 6.057349 | Hannan-Quinn criter. | | -0.247278 |
| F-statistic | 4.036708 | Durbin-Watson stat | | 0.416567 |
| Prob(F-statistic) | 0.033711 | Wald F-statistic | | 7.487895 |
| Prob(Wald F-statistic) | 0.004375 | | | |

Sumber : Olahan Data E-views 8.

Berdasarkan dari hasil uji autokorelasi dengan menggunakan metode HAC telah disembuhkan dan hasilnya sebagai berikut: nilai probabilitas variable inflasi sebesar 0.6716 berarti 0.6716 lebih besar dari $\alpha = 5\%$ maka menunjukkan bahwa tidak signifikan. Nilai probabilitas variable upah minimum sebesar 0.0008 berarti lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ maka menunjukkan bahwa signifikan. Nilai probabilitas variable pertumbuhan ekonomi sebesar 0.6300 berarti 0.6300 lebih besar dari $\alpha = 5\%$ maka menunjukkan bahwa tidak signifikan. Nilai R-Squared sebesar 0.502284 sedangkan nilai kritis chi-square (χ^2) pada $\alpha = 5\%$ dengan degree of freedom sebesar 10 adalah 18.31.

Sedangkan nilai probabilitas (F-statistik) menunjukkan angka sebesar 0.033711 $< \alpha = 5\%$ dan signifikan secara statistic.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

1. Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se Propinsi DIY periode tahun 2008 – 2014 termasuk dalam kriteria yang rendah. Hasil analisis rata-rata Indeks Williamson selama tahun pengamatan 2008 – 2014 mengalami ketimpangan yang cukup rendah dan cenderung mengalami penurunan. Rata-rata indeks williamson sebesar 0,34229 menunjukkan bahwa kategori indeks ini berada pada interval 0 - 0,5 yaitu termasuk dalam ketimpangan pendapatan yang rendah.
2. Hasil penelitian menemukan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se Propinsi DIY. Hal ini berarti semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka akan semakin meningkatkan ketimpangan daerah.

3. Hasil penelitian menemukan Jumlah penduduk yang bekerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten di Propinsi DIY. Hal ini berarti besar kecilnya jumlah penduduk yang bekerja belum mampu menurunkan ketimpangan yang terjadi antar daerah di propinsi DIY.
4. Hasil pengujian hipotesis ketiga menemukan bahwa Pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten di Propinsi DIY. Hal ini berarti semakin besar Pengeluaran pemerintah maka semakin rendah ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se Propinsi DIY.
5. Hasil analisis menemukan bahwa investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada pemerintah daerah kota/kabupaten se Propinsi DIY. Hal ini berarti besar kecilnya investasi yang ada di propinsi DIY belum mampu menurunkan ketimpangan pendapatan antar daerah.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis, yaitu:

1. Untuk menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan maka saran yang dapat diberikan hendaknya pemerintah daerah diharapkan mampu merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat untuk masing-masing kabupaten/kota di Provinsi DIY. Selanjutnya pemerintah daerah diharapkan mampu mengarahkan pengembangan infrastruktur kepada kabupaten-kabupaten yang selama ini tingkat pembangunannya masih tertinggal dengan mengalokasikan pengeluaran / belanja daerah yang lebih besar.
2. Kedua, pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan kualitas tenaga kerja di masing-masing kabupaten/kota di DIY, sehingga mampu merumuskan kebijakan untuk merangsang dunia usaha agar peluang usaha semakin terbuka sehingga kebutuhan akan tenaga kerja bertambah dan ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Yogyakarta akan semakin berkurang seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Hal ini penting karena pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan daerah.

Daftar Pustaka

- Adipuryanti Ni Luh Putu Yuni, I Ketut Sudibia, 2015, Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Yang Bekerja Dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali, *Piramida Vol. XI No. 1 : 20 – 28*
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Ed. 3, Yogyakarta. Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- Barro, Robert J. 1999. *Inequality, Growth, And Investment*. NBER Working Paper , No. 7038. Cambridge
- Dhyatmika Ketut Wahyu, Hastarini Dwi Atmanti, 2013, Analisis Ketimpangan Pembangunan Provinsi Banten Pasca Pemekaran, *Diponegoro Journal Of Economics*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013, p: 1- 8
- Estudillo, Jonna P. 1997. Income Inequality In The Philippines 1961-91. *The Developing Economics*. 35 (1), pp: 68-95. *University of Hawaii*.
- Haris, Muhammad. 2014. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2012. *Skripsi Sarjana Jurusan IESP pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro*, Semarang
- Hirschman, Albert O. 1973. *The strategy of Economic Development*. Sixteenth Printing, Yale University Press.

- Jhingan, M.L. 2004. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Kuncoro, Mudrajad, 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Jakarta : Penerbit Erlangga, Jakarta
- Lili, Masli, 2008, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat, *e journal Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)*
- Mangkoesebroto, G, 2008, *Ekonomi Publik*, Edisi Ketiga, BPFE Yogyakarta.
- Musfidar, Ma'mun. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Sulawesi Selatan Tahun 2001-2010. *Skripsi Sarjana Jurusan Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makasar*
- Myrdal, Gunnar., 1957, *Economic Theory and Underdeveloped Regions*. London: Duckworth
- Putra Linggar Dewangga, Achma Hendra Setiawan, 2009, Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2000 – 2007, *e-journal Universitas Diponegoro Semarang*
- Putri Yosi Eka, Syamsul Amar, Hasdi Aimon, 2012, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia, *Ejournal.Universitas Negeri Padang*
- Rahardja, Prathama. Manurung, Mandala. 2005. *Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar*, Edisi Ketiga, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Samuelson, Paul A. Dan Nordhaus William D. 1996. *Makro Ekonomi*. Edisi ke-17. Cetakan ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Sukirno, Sadono, 2010, *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Kebijakan*, Jakarta: Kencana
- Sultan, Jamzani Sodik, 2010, Analisis Ketimpangan Pendapatan Regional Di Diy-Jawa Tengah Serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Periode (2000- 2004), *Buletin Ekonomi Vol. 8, No. 1, April 2010 hal 1-70*
- Sutarno dan Kuncoro. 2003. *Perumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas, 1993-2000*
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Baduouse Media CetakanPertama.Padang
- Tambunan, Tulus. 2006. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Gahlia Indonesia
- Todaro, Michael dan Smith, Stephen. (2004). *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. (Terjemahan) Erlangga: Jakarta